

## Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat

Vicky Dompas\*

*Fakultas Ekonomi Universitas Klabat*

Penelitian ini tujuannya untuk kesejahteraan anggota koperasi di ukur dari keempat variabel yaitu Sumber daya manusia (SDM), kualitas fungsi manajemen, sumber bantuan dari anggota koperasi, dan agama adalah Pengambilan sampel di dasarkan atas potensi wilayah dan kondisi perekonomian, yaitu; wilayah perkebunan, nelayan, peternakan dan perindustrian rakyat. Perkembangan perkoperasian di wilayah kerja, badan perkoperasian umumnya berada pada posisi menunggu fasilitas bantuan, baik bantuan dana maupun bantuan pendapat, tuntunan ataupun panduan dari pemerintah atau dari instansi swasta lainnya. Sebagian badan koperasi yang terdaftar dilapangan, masih berada pada posisi untuk menantikan penggerak atau kedatangan fasilitas kesempatan atau kesempatan istimewa seperti yang pernah diperolehnya terdahulu.

Keywords: koperasi, anggota, dan masyarakat

### PENDAHULUAN

Kabupaten Minahasa Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2003, dengan ibukotanya Airmadidi. Secara geografis terletak antara 1°14' - 1°56' LU dan 124°42' - 124°13' BT. Adapun batas-batas Kabupaten Minahasa Utara meliputi: a). Sebelah Utara laut Sulawesi, b) sebelah Timur Kota Bitung, c) sebelah selatan Kabupaten Minahasa, d) Kota Manado.

Tirayoh, 2005 mengemukakan bahwa potensi ekonomis wilayah Kabupaten Minahasa Utara dengan data produksi perkebunan, produksi pangan, produksi perikanan, ternak, tambang, potensi wisata dan potensi sungai. Produksi perkebunan pada laporan tahunan diwilayah ini didominasi oleh kegiatan perkebunan kelapa

dengan luas 40.585 ha, dan memberi hasil produksi 335.747 ton untuk tahun 2004.

Pada tahun 2002, penduduk Kabupaten Minahasa Utara sekitar 157.898 jiwa. Dengan luas wilayah 916,30 km<sup>2</sup> berarti kepadatan penduduk rata-rata mencapai 172 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan data per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Airmadidi yaitu 248 jiwa/km<sup>2</sup> yang diikuti oleh Kecamatan Kauditan yaitu 230 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Likupang Timur yaitu 107 jiwa/km<sup>2</sup>.

Adapun data kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan jenis kelamin, di kabupaten Minahasa Utara rata-rata penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan sex ratio yang lebih besar dari 100 yaitu 102,15. Namun terdapat kecamatan yang berpenduduk jenis kelamin perempuan lebih besar yaitu kecamatan Dimembe.

\*alamat korespondensi:  
vicky\_dompas@yahoo.com

Tabel 1. Kepadatan Penduduk setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan
1	Kauditan	91,27	20.991	229,99
2	Kema	80,43	13.257	164,83
3	Airmadidi	156,4	38.784	247,98
4	Wori	86,52	17.083	197,45
5	Dimembe	230,11	31.998	139,06
6	Likupang Barat	83,27	15.582	187,13
7	Likupang Timur	188,3	20.203	107,29
	Jumlah	916,30	157.898	172,32

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2005

Penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio di Kabupaten Minahasa Utara

adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Kauditan	10.617	10.374	20.991	102,34
2	Kema	6.711	6.546	13.257	102,34
3	Airmadidi	19.517	19.267	38.784	101,30
4	Wori	8.825	8.258	17.083	106,87
5	Dimembe	19.517	16.018	31.998	99,76
6	Likupang Barat	7.815	7.767	15.582	100,62
7	Likupang Timur	10.323	9.880	20.203	104,48
	Jumlah	79.788	78.110	157.898	102,15

Sumber: Kabupaten Minahasa Utara Dalam Angka Tahun 2005

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2005

Sedangkan untuk Kecamatan Airmadidi sebagai lokasi penelitian terdiri dari 3 (tiga) desa dan 6 (enam) Kelurahan yaitu; desa Tanggari, desa Sampiri, desa Sawangan, dan enam kelurahan yaitu; kelurahan Airmadidi Atas, kelurahan Airmadidi Bawah, kelurahan Rap-Rap, kelurahan Sarongsong Satu, kelurahan Sarongsong Dua, dan kelurahan Sukur.

**Posisi Perkoperasian Kabupaten Minahasa Utara.** Dari hasil wawancara perkoperasian di ruang kerja Kepala tata usaha Kantor Dinas perindagkop dan penanaman modal di Airmadidi, diperoleh informasi bahwa penanganan perkoperasian di Kabupaten Minahasa Utara saat ini masih berada pada tingkat untuk membina badan perkoperasian agar tetap eksis, bertahan dan bertumbuh kembang, menurut ketentuan yang berlaku. Sedangkan perkembangan perkoperasian di wilayah kerja, badan perkoperasian umumnya berada pada posisi menunggu fasilitas bantuan, baik bantuan

dana maupun bantuan pendapat, tuntunan ataupun panduan dari pemerintah atau dari instansi swasta lainnya. Disisi lain, sebagian badan koperasi yang terdaftar dilapangan, masih berada pada posisi untuk menantikan penggerak atau kedatangan fasilitas kesempatan atau kesempatan istimewa seperti yang pernah diperolehnya terdahulu.

Namun ketika didata lebih lanjut didapati, ternyata di Kabupaten Minahasa Utara, masih terlihat kehadiran badan-badan koperasi yang masih eksis dan bertahan setelah melewati beberapa masa waktu, antara lain, KUD Tamporok Tatelu sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu, koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Airmadidi, Koperasi Veteran dan Koperasi Purnawirawan TNI Airmadidi, Koperasi Primkobabri Airmadidi, yang diketuai Bapak Alex Kakote, dan Koperasi Karyawan Swasta PT Aqua Airmadidi.

Ketika ditanyakan tentang harapan kedepan untuk Tahun 2011 - 2015, tentang

perkoperasian, diwilayah ini, diberi respons, bahwa pencapaian koperasi itu mesti melihat kekuatan dasar jiwa koperasinya dahulu baru merinci harapan. Karena seperti uraian tentang beberapa badan koperasi yang eksis, sejarahnya berawal dari koperasi simpan pinjam yang dimulai dengan kegiatan mapalus (gotong royong adat Minahasa). Kedua faktor ini yakni simpan pinjam dan mapalus, adalah merupakan dasar kokok ketahanan badan koperasi. Purwostjipto, 2003 mengemukakan bahwa, kesediaan seseorang untuk berkumpul dengan beberapa orang yang lain itu adalah keempat fase yang menjadi dasar perkumpulan itu yakni, pertama adanya dorongan kebersamaan yang dikehendakinya, kedua, mereka memiliki kegemaran yang sama, oleh karena itu, ketiga mereka mewujudkan satu tujuan yang sama, akhirnya pada fase keempat, mereka secara bersama-sama bekerja sama. Disisi lain, Tangian 2005 menekankan, perkembangan badan koperasi yang eksis, telah dibuktikan oleh faktor dedikasi, dan kemampuan kepengurusan yang berwawasan luas.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, lebih merupakan organisasi swadaya masyarakat yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan-kegiatan serta pelaksanaannya. Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa secara konstitusional keberadaan koperasi tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, secara makro koperasi dicita-citakan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dalam rangka menciptakan kemakmuran masyarakat. Hudiyanto, 2002.

Bhenyamin, 2005. Masa depan koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian seperti amanat konstitusi

Negara (UUD 45) sangat ditentukan oleh mampu tidaknya kemandirian dilaksanakan untuk menjawab tantangan maupun ancaman. Dilihat dari fungsinya sebagai badan usaha, ketangguhan koperasi diukur oleh kemampuannya dalam mengembangkan dan menguasai pasar. Koperasi harus mampu memberi alternatif rasional bagi pelanggannya (anggota) melalui berbagai kebijakan insentif usaha maupun perbaikan teknis pelayanan kepada pelanggan.

Kemampuan organisasi koperasi untuk mencapai keberhasilan tergantung pada pribadi semua anggota, pengurus, dan kelembagaan usaha koperasi. Para anggota akan terus mempertahankan keanggotaannya apabila mereka memperoleh manfaat dari koperasi (cooperative effect). Untuk itu koperasi harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai institusi yang tangguh dalam tatanan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal itu tentunya koperasi harus bekerja berdasarkan prinsip – prinsip dan jati dirinya dalam mencapai tujuan. Mohammad, 2006.

Hartono, 2005 menyatakan bahwa Eksistensi koperasi di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) dengan penjelasannya, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai itu adalah koperasi. Eksistensi koperasi sebagai Badan Hukum kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104/Kep./M.KUKM/III/2004. Keputusan

Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang seperti yang dikemukakan, maka peneliti mengambil variabel-variabel terukur yang dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menyelesaikan bagaimana sesungguhnya eksistensi koperasi di Kabupaten Minahasa Utara dan keterkaitannya dengan kesejahteraan anggotanya. Adapun variabel-variabel terukur adalah pada koperasi sebagai kelembagaan dan terutama pada anggotanya dari sisi kesejahteraan. Dalam koperasi sebagai satu lembaga dapat dikategorikan ke dalam tiga karakteristik yaitu SDM-nya, kualitas fungsi manajemennya, dan koperasi sumber informasi, pembimbing, dan koperasi sumber bantuan moril/materil. Seperti yang dikemukakan oleh Iskandar, 2007 dalam disertasinya bahwa ukuran kesejahteraan adalah harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian.

**Perumusan Masalah.** Dengan bertumbuhnya koperasi secara pesat dan dibarengi jumlah anggota koperasi yang banyak maka timbul beberapa masalah yang perlu diteliti yaitu sejauhmana eksistensi koperasi di Kabupaten Minahasa Utara dan keterkaitannya dengan kesejahteraan anggota dilihat dari 4 segi yaitu sumber daya manusia, kualitas fungsi manajemen, sumber bantuan anggota koperasi, dan Agama.

**Tujuan Penelitian.** Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauhmana kesejahteraan anggota koperasi dilihat dari keempat segi permasalahan di atas yaitu Sumber daya manusia (SDM), kualitas fungsi manajemen, sumber bantuan dari anggota koperasi, dan agama.

**Kontribusi Penelitian.** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membantu kepada

koperasi - koperasi yang masih eksis di Minahasa Utara; Kontribusi kepada anggota-anggota koperasi untuk lebih baik dalam bekerjasama untuk membangun masyarakat yang dinamis, dalam menanggulangi kemiskinan. Mensejahterakan para anggota-anggota koperasi melalui bantuan-bantuan mulai dari kredit usaha kecil (KUK) sampai ke usaha makro kecil menengah (UMKM); Bagi peneliti, dapat memberikan bahan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan.

**Kajian Teori.** Eksistensi Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. Pelaku ekonomi Indonesia ada tiga yaitu BUMN/BUMD, koperasi dan BUMS (swasta). Dengan demikian eksistensi koperasi absah di Indonesia, bahkan diharapkan dapat menjadi soko-guru perekonomian Indonesia. Meskipun tujuan ideal koperasi sebagai soko guru dalam perekonomian Indonesia, namun peran koperasi kalah jauh dibandingkan BUMN/BUMD apalagi dengan BUMS. Koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *co* yang berarti bersamaan dan *operare* berarti bergerak berusaha. Jadi secara singkat dalam koperasi harus ditunjukkan kebersamaan dalam menjalankan usaha, (Suratal HW, 1993).

Menurut UU Nomor 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seperti definisi koperasi yang dikemukakan oleh Bung Hatta, yaitu koperasi sebagai badan usaha, beranggotakan orang-seorang, prinsip ekonomi sebagai dasar kegiatannya. Juwana, 2004.

Bung Hatta menyatakan bahwa koperasi harus tetap teguh memegang asas yaitu, asas individualitas, yaitu koperasi dan anggota koperasi harus percaya pada kekuatan diri sendiri, asas solidaritas, yaitu kesetiakawanan antara anggota, antara pengurus/pengawas dan antara anggota dengan Pengurus/Pengawas. Dilihat dari nilai dasar koperasi yaitu meliputi keadilan,

persamaan, saling tolong menolong. Ide dasar koperasi Indonesia yaitu, kesempatan dalam hak yang sama, pembagian pendapatan dan kekuasaan yang adil, kesukarelaan dalam peningkatan partisipasi, komitmen dan tanggungjawab, melayani kebutuhan (ekonomi) para anggota.

Berkaitan dengan eksistensi koperasi, dapat dilihat dari kinerja koperasi, Mohamad Mahsun (2003) mengusulkan beberapa upaya konkrit antara lain pertama, penegakan disiplin harus dilaksanakan secara maksimal. Hal ini salah satunya ditandai dengan kejelasan akan sanksi dan apresiasi. Hendaknya disadari bahwa pengurus koperasi baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi. Kedua, birokrasi yang berbelit-belit seharusnya dipangkas. Bila kreativitas usaha dihambat oleh kepentingan birokrasi, maka besar kemungkinan koperasi tersebut sulit untuk bisa berkembang. Ketiga, menumbuhkan budaya berdasarkan Misi. Mengubah koperasi yang digerakkan oleh peraturan dan birokrasi menjadi koperasi yang digerakkan oleh misi. Keempat, koperasi berorientasi pada anggota dan masyarakat. Pertanggungjawaban pengurus pada saat RAT mestinya bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan birokrasi tetapi penilaian terhadap seberapa berhasil para pengurus memenuhi kebutuhan dan harapan anggota atau masyarakat selain anggota koperasi. Kelima, berorientasi pada mekanisme pasar. Koperasi harus mengembangkan prinsip-prinsip perusahaan dan pasar secara maksimal. Keenam, penerapan teknologi maju.

Ide dasar koperasi Indonesia meliputi; kesempatan dalam hak yang sama; pembagian pendapatan dan kekuasaan yang adil; kesukarelaan dalam peningkatan partisipasi, komitmen dan tanggungjawab; melayani kebutuhan (ekonomi) para anggota. Dapat dilihat juga dari etika dasar koperasi yaitu kejujuran, kemanusiaan dan kepedulian, kesetiakawanan dan kebersamaan, kebenaran, dan pikiran yang demokrasi, serta perilaku yang konstruktif.

Anoraga, 2003 bahwa pemerintah disisi lain menunjuk Pasal 33 ayat 1, UUD 1945, menegaskan bahwa "perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan". Untuk itu Undang - undang Koperasi Tahun 1967 No. 12 tentang pokok-pokok Perkoperasian telah meletakkan pengertian koperasi, bahwa "Koperasi di Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan - badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Koperasi Tahun 1992, menegaskan dalam Pasal 2 tentang Landasan dan Asas, bahwa "koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 atas asas Kekeluargaan. Sedangkan Pasal 3, merinci tujuan koperasi dengan "Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan UUD 1945.

**Fungsi dan Peran Koperasi Dalam Mensejahterakan Anggota.** Sekjen DEKOPINWIL, 2010 menyatakan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain.

Lebih lanjut beliau katakan, sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat

memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi.

R. M. Ramudi Arifin, 2010 menyatakan bahwa dalam batas ekonomi, kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. Sebagai contoh dalam koperasi produsen, yang berarti anggota sebagai produsen produk tertentu, yang menjalankan usaha/bisnisnya membutuhkan pelayanan dari koperasi dalam bentuk penyediaan input produksi, penyediaan kredit, dan atau pemasaran output yang dihasilkan.

Muhamad Mahsum 2003, mencatat bahwa volume usaha koperasi pada tahun 1998 dengan jumlah koperasi sebanyak 52.458 unit mencapai Rp. 19.534 milyar, selanjutnya pada tahun 2000 dengan jumlah koperasi lebih dari 100.000 unit, volume usaha koperasi menurun menjadi Rp. 14.643 milyar. Memang penurunan volume usaha ini bukan semata-mata disebabkan oleh pengurus koperasi dan tidak semua pengurus koperasi mempunyai produktivitas yang rendah.

Warhono dan Mulyana (2001) menganjurkan agar para pengelola perlu memiliki berbagai kompetensi untuk menjalankan fungsinya. Mereka perlu mempunyai sikap terbuka terhadap penemuan-penemuan baru (inovasi) yang mendukung jalannya tugas keorganisasian dan usaha. Sikap lain yang harus dimiliki

pengelola hubungannya dengan usaha adalah kemampuan dalam menghimpun modal. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengelola.

Muhamad Mahsum (2003) yakin bahwa pengurus diberi amanah (*trusteeship*) oleh para anggota untuk mengelola koperasi sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Mereka bertanggung jawab melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Dengan begitu, pengurus koperasi dituntut mempunyai kemampuan dan keterampilan manajerial yang memadai. Selain itu, mereka juga harus mempunyai *sense of public service*, yaitu kesadaran untuk memberikan layanan masyarakat yang dilandasi oleh rasa pengabdian.

Koperasi memang ditujukan untuk pengusaha kecil tetapi tetap memiliki kemampuan ekonomi. Bayu Krisnamurti (2003) memberi gambaran bahwa keinginan dan kebutuhan untuk membentuk koperasi cukup besar di kalangan pengusaha kecil di berbagai bidang usaha, di berbagai tempat. Bayu mencontohkan beberapa pengusaha jamu di daerah Surakarta dan sekitarnya menghadapi kesulitan bahan baku (ginseng) yang pasokannya dimonopoli oleh pengusaha besar. Mereka ingin berkoperasi tetapi tidak dengan pola koperasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah

## METODE PENELITIAN

Populasi penelitian adalah semua Koperasi di Kabupaten Kepulauan Minahasa Utara. Peneliti mendapatkan data sampel dari instansi pemerintah yang terkait sehubungan dengan Koperasi. Pengambilan sampel di dasarkan atas potensi wilayah dan kondisi perekonomian, yaitu; wilayah perkebunan, wilayah nelayan, wilayah peternakan dan wilayah perindustrian rakyat.

Penelitian ini menggunakan *questionnaire* untuk mendapatkan data dari koperasi yang menjadi responden.

Pernyataan serta pertanyaan-pertanyaan dalam questionnaires terfokus pada masalah utama yaitu eksistensi koperasi dan kesejahteraan terhadap para anggota. Sebagai pelengkap diadakan pula wawancara mendalam jika terdapat jawaban yang perlu klarifikasi atau untuk kepentingan tafsiran terhadap analisis data yang terkumpul dari angket.

**Koperasi.** Variabel yang digunakan sebagai indikator eksistensi koperasi di Kabupaten Minahasa Utara adalah sumber daya manusia, kualitas fungsi manajemen dan koperasi dalam menjalankan tugasnya sebagai sumber bantuan bagi anggota.

Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ini dapat dilihat dari data hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1. Responden setuju bahwa koperasi memiliki sumber daya manusia yang baik, yang bertaqwa kepada Tuhan dan bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan. Responden tidak setuju bahwa pengurus tidak stabil dalam mengambil keputusan, sehingga disimpulkan bahwa pengurus stabil dalam pengambilan keputusan. Ada hal yang bertolak belakang tentang masalah agama, responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju dalam berkoperasi tidak memandang status agama atau dengan perkataan lain mereka setuju dalam berkoperasi memandang status agama, yang artinya dalam berkoperasi membedakan status agama. Di sisi lain mereka menyatakan setuju bahwa pengurus koperasi memiliki toleransi agama yang tinggi.

Dalam hal manajemen dalam pengelolaan koperasi, responden setuju bahwa manajemen koperasi baik. Keadaan ini ditunjukkan oleh manajemen yang bagus

dan kegiatan program terarah, pengelolaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang, dan koperasi sering mendapat penghargaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa manajemen dalam pengelolaan koperasi baik.

Koperasi dalam menjalankan tugasnya untuk membantu anggota, dinyatakan oleh responden bahwa mereka setuju koperasi telah menjalankan fungsinya untuk membantu anggota. Keadaan ini dinyatakan dengan koperasi memberi pinjaman kepada anggota, koperasi merangkul usaha rumah tangga, pembagian hasil dilakukan secara merata, pengurus memperhatikan keadaan dan kebutuhan anggota koperasi, pengurus memperhatikan masyarakat dengan ekonomi lemah, koperasi menciptakan barang, jasa atau uang untuk membantu anggota, koperasi memberi modal sesuai kebutuhan anggota, koperasi membantu anggota dalam penyediaan modal usaha, dan koperasi merupakan jalan tengah untuk membuat masyarakat sejahtera. Selain itu responden juga setuju bahwa pemerintah mendukung koperasi yang ada di Kecamatan Airmadidi.

Ketiga faktor yang diukur untuk menentukan eksistensi koperasi memiliki penilaian yang sama dari responden, yaitu responden setuju bahwa SDM baik, manajemen baik, dan koperasi dalam menjalankan fungsinya membantu anggota juga baik. Tetapi dengan menggunakan Anova untuk melihat apakah ada perbedaan dari ketiga faktor tersebut, diperoleh hasil ternyata ada perbedaan antara ketiga faktor tersebut (tabel 2). Angka sig. ( $=.000$ )  $< .05$  menunjukkan bahwa ada perbedaan antara faktor-faktor koperasi.

Tabel 3. Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	Interpretasi
Pengurus koperasi tidak stabil dalam pengambilan keputusan	1.93	.655	Tidak setuju
Pimpinan dan anggota memiliki SDM yang baik	2.54	.593	Setuju
Dalam berkoperasi tidak memandang status agama	2.43	.640	Tidak setuju
Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan	2.95	.672	Setuju
Pengurus memiliki toleransi agama yang tinggi	2.79	.782	Setuju
Suasana koperasi taqwa kepada Tuhan, sehingga tidak teradi hal-hal yang merugikan koperasi	2.62	.693	Setuju
<b>SDM koperasi baik</b>	2.54	.28	Setuju
Manajemen sangat bagus dan program kegiatan terarah	2.78	.579	Setuju
Pengelolaan koperasi sangat baik, sesuai dengan peraturan UU	2.86	.739	Setuju
Koperasi sering mendapat penghargaan	2.96	.875	Setuju
<b>Manajemen koperasi baik</b>	2.8667	.49008	Setuju
Koperasi memberi pinjaman kepada anggota	2.77	.694	Setuju
Koperasi merangkul usaha rumah tangga	3.01	.823	Setuju
Pembagian hasil dilaksanakan secara merata	2.57	.856	Setuju
Pengurus memperhatikan keadaan dan kebutuhan anggota koperasi	3.03	.594	Setuju
Pengurus memperhatikan masyarakat dengan ekonomi lemah	2.88	.832	Setuju
Koperasi menciptakan jasa, barang, atau uang untuk membantu anggota	3.14	.636	Setuju
Koperasi memberi modal kepada anggota sesuai kebutuhan anggota	2.92	.677	Setuju
Koperasi membantu anggota dalam penyediaan modal usaha	2.70	.595	Setuju
Koperasi merupakan jalan tengah untuk membuat rakyat kecil menjadi sejahtera	2.72	.712	Setuju
<b>Koperasi membantu anggota</b>	2.86	.31	Setuju
Anggota aktif mengikuti pertemuan	2.72	.900	Setuju
Anggota mendukung usaha yang dilakukan	2.98	.816	Setuju
Anggota wajib membayar iuran setiap bulan	2.90	.644	Setuju
Anggota koperasi sangat mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga	3.34	.639	Setuju
<b>Anggota menjalankan kewajiban dengan baik</b>	3.0440	.45534	Setuju
Anggota memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan	2.73	.777	Setuju
Anggota saling bekerja sama	3.28	.766	Setuju
Saling bekerja sama dengan baik di bidang sosial, agama, dan pendidikan	2.85	.770	Setuju
Pengurus dan anggota bekerjasama dengan baik	2.78	.690	Setuju
<b>Kerja sama</b>	2.78	.48	Setuju
Pemerintah mendukung koperasi yang ada di kec. Airmadidi	2.63	.706	Setuju

Tabel 4. Anova Faktor-faktor Koperasi

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.829	2	3.414	24.298	.000
Within Groups	41.735	297	.141		
Total	48.564	299			

Tabel 5. Uji Beda Faktor-faktor Koperasi

GOLKOP	N	Subset for alpha = .05	
		1	2
SDM	100	2.5433	
Memberi bantuan	100		2.8600
Manajemen	100		2.8667
Sig.		1.000	.900

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 100.000.

Dari tabel 5 dapat ditunjukkan bahwa dari ketiga faktor koperasi terdapat perbedaan antara SDM koperasi dengan manajemen koperasi dan fungsi koperasi dalam memberi bantuan. Manajemen koperasi dan fungsi koperasi dalam memberi bantuan tidak berbeda. Faktor penguat bagi koperasi adalah pemerintah mendukung kegiatan koperasi di Kecamatan Airmadidi.

**Anggota.** Kriteria anggota yang diambil dari penelitian ini meliputi anggota menjalankan kewajiban dan kerja sama anggota. Secara umum responden setuju bahwa anggota telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan juga anggota telah menunjukkan kerja sama yang baik (tabel 6).

Anggota dalam menjalankan kewajibannya ditunjukkan oleh anggota aktif mengikuti pertemuan, anggota mendukung usaha yang dilakukan, anggota

melaksanakan kewajibannya dalam membayar iuran setiap bulan, dan anggota mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Dalam melaksanakan kerja sama dengan baik, ditunjukkan oleh anggota selalu memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan, saling bekerja sama dengan baik di bidang sosial, agama dan pendidikan. serta pengurus dan anggota selalu bekerja sama dengan baik.

Kegiatan dalam menjalankan kewajiban dan kerja sama yang baik, keduanya disetujui oleh responden, tetapi keduanya berbeda (tabel 6). Dengan menggunakan t-test didapatkan bahwa anggota dalam menjalankan kewajiban, berbeda sangat signifikan dari kerja sama anggota. Nilai anggota menjalankan kewajiban lebih baik dibandingkan dengan kerja sama anggota.

Tabel 6. Uji beda faktor anggota

	Mean	Std	Std Error	95%Conf.Intr		t	df	Sig
				Mean	Lower			
Kewajiban anggota – Kerja sama	.2573	.4988	.04988	.1584	.3563	5.159	99	.000

**Hubungan antara Koperasi dengan Anggota.** Analisa korelasi antara koperasi dengan anggota (tabel 6) menunjukkan

bahwa terjadi korelasi antara keberadaan koperasi dengan anggota.

Tabel 7. Korelasi antara koperasi dan anggota

Koperasi		Anggota	
		Menjalankan kewajiban dengan baik	Kerja sama
SDM koperasi baik	Pearson Correlation	.269(**)	.424(**)
	Sig. (2-tailed)	.007	.000
Manajemen koperasi baik	Pearson Correlation	.289(**)	.185
	Sig. (2-tailed)	.004	.065
Koperasi membantu anggota	Pearson Correlation	.551(**)	.427(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Terjadi korelasi yang sangat signifikan antara SDM koperasi dengan keadaan anggota dalam menjalankan kewajiban dan juga terjadi korelasi yang sangat signifikan antara SDM koperasi dengan kerja sama yang dilakukan oleh anggota. Keadaan ini menunjukkan bahwa bila SDM koperasi baik maka anggota juga akan menjalankan kewajibannya dengan baik dan juga melakukan kerja sama dengan baik.

Manajemen koperasi berkorelasi sangat signifikan dengan anggota dalam menjalankan kewajiban, tetapi tidak berkorelasi dengan kerja sama anggota. Hal ini menunjukkan bahwa bila manajemen koperasi baik, maka anggota juga akan menjalankan kewajiban dengan baik. Kerja sama anggota tidak ditentukan oleh manajemen koperasi, artinya anggota tetap melakukan kerja sama yang baik, tidak peduli apakah manajemen koperasi baik atau buruk.

Koperasi dalam menjalankan perannya membantu anggota berkorelasi sangat signifikan dengan anggota dalam melakukan kewajibannya dan kerja sama anggota. Hal ini menunjukkan bahwa bila koperasi menjalankan perannya membantu anggota dengan baik, maka anggota juga akan menjalankan kewajibannya dengan baik dan melakukan kerja sama dengan baik.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: Koperasi memiliki SDM yang baik. Pelaksanaan manajemen di koperasi berjalan baik. Koperasi telah menjalankan fungsi untuk membantu anggota dengan baik. Anggota koperasi telah menjalankan kewajiban dengan baik. Kerja sama anggota koperasi berlangsung baik. Pemerintah mendukung kegiatan koperasi di Kecamatan Airmadidi. SDM koperasi

memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan anggota dalam menjalankan kewajibannya dan kerja sama anggota. Manajemen koperasi memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan anggota dalam menjalankan kewajibannya, tetapi tidak berkorelasi dengan kerja sama anggota. Koperasi dalam menjalankan fungsinya untuk membantu anggota berkorelasi sangat signifikan dengan anggota menjalankan kewajibannya dan kerja sama anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono. Sunarvati. 2005. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Peranan Hukum Dalam Pembangunan yang Berkeadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung
- Hatta, Mohammad, 2006. *Beberapa Fasal Ekonomi Menuju ke Ekonomi Koperasi*, Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, Jakarta, Cet. Kelima
- Bhenyamin, Irfan Riawan Maksun, Muhammad Riduansyah, Puji Nur Hanafi, 2005, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah Dan Kota, FISIP-Universitas Indonesia
- Hudiyanto, 2002, *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Infokop, 2004, *Koperasi Dalam Perspektif Masa Depan*, No. 24, Kementerian Koperasi dan UKM
- Juwana, Hikmahanto, 2004, *Perubahan Hukum di Indonesia, Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia, Indonesia Australia*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum
- Krisnamurti, Bayu. 2003. *Membuat Koperasi Eksis tidak hanya pada Hari Koperasi* Jurnal Ekonomi Rakyat 2.
- Mahsun, Muhamad, 2003. *Upaya Peningkatan Produktivitas Koperasi, Disampaikan pada acara Pelatihan Pegawai PT Bromosakti Yogyakarta, 23 Juni 2003.*
- Mintorahardjo, Sukowaluyo, 2004, *Menuju Welfare State Melalui Koperasi, Koperasi Dalam Perspektif Masa Depan*, Infokop, Nomor 24, Tahun XX
- Soedjono, Ibnoe, 2003, *International Co-operative Alliance, Jatidiri Koperasi*, Cetakan Keenam, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta
- Sularso, 2005, *Kembali Ke Jatidiri Koperasi*, Infokop Nomor 26 Tahun XX 2005, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Suwandi, Ima, 1982, *Koperasi, Organisasi Ekonomi yang Bervatak Sosial*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta
- Tambunan, Tulus, 2003, *Globalisasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan Suatu Peluang atau Ancaman*, LP3E, Kadin Indonesia, Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Tulus, Robby, 2005, *Koperasi Transnasional, Eksperimen Dinamis di Uni Eropa*, Majalah Pusat Informasi Perkoperasian, Dekopin, Lapenkop
- Widjaja, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta